



Dampak Naratif Populis Narendra Modi Sebagai Perdana Menteri India Terhadap Keamanan Pakistan: Analisis Idiosinkratik

Muhammad Hafizh Hawari

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin

Agussalim Burhanuddin

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin

Address: Kampus Jl. Perintis Kemerdekaan No.KM.10, Tamalanrea Indah,
Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245

Corresponding author: muh.hafizkdi@gmail.com

Abstract: *Populist politics, are strategies, that due to its versatile nature has been implemented in different regions across countries with different characteristics. India, as a nation ruled by Hindu majority, saw the rise of Narendra modi, a politician commonly known for its strategies to appeal to the Hindutva India. A hardline Hindu majority striving to establish a puritan Hindu Indian nation. During his attempts to appeal into the Hindu majority, Narendra Modi commonly applied narratives that divide the majority and the Muslim minority, much to the loss of the minority Muslim community caused by constant antagonization and demonization commonly found within Modi's political practices. The implication of such strategies however, are not limited to muslims within India, but also saw the implications of Indian governments attempts to appeal into the broader Hindu narrative seeping into Indian foreign policies and stances, most commonly affecting its closest Muslim neighbor, Pakistan. This paper then, aims to research the populist politics applied by Modi during his reigns in India, and how it affects the security of Pakistan utilizing a realist prespective.*

Keywords: *India, Narendra Modi, Pakistan, Populism Politics, Security.*

Abstrak: Politik populis merupakan strategi politik, yang dikarenakan versatilitasnya, telah diimplementasikan di negara-negara dengan karakteristik yang jauh berbeda dari satu sama lain. India, sebagai negara yang dipimpin oleh mayoritas Hindu, telah menyaksikan naiknya Narendra Modi, seorang politisi yang umumnya dikenal dengan strateginya yang berfokus kepada elektabilitas di antara kalangan Hindutva. Sebuah Hindu mayortarianisme puritan garis keras yang memiliki tujuan mendirikan negara Hindu India. Narendra Modi umumnya memakai narasi yang membagi mayoritas Hindu India dengan masyarakat Muslim yang merupakan minoritas, yang pada akhirnya merugikan komunitas Muslim di India. Hal ini disebabkan oleh antagonisasi yang dilakukan Modi secara masif dan berulang. Implikasi dari strategi yang dilakukan oleh Modi, tidak hanya mempengaruhi etnis Muslim lokal di India, tetapi juga mempengaruhi upaya pemerintah India untuk diterima oleh mayoritas Hindu India menggunakan kebijakan asing sebagai ekstensi dari rezim kekuasaannya, yang berujung dengan ancaman-ancaman serta agresivitas yang dimiliki oleh pemerintah India terhadap beberapa negara tetangganya, termasuk Pakistan, sebagai negara bermayoritas penduduk muslim

Kata kunci: Keamanan, India, Narendra Modi, Pakistan, Populisme

LATAR BELAKANG

Narendra Modi, perdana menteri terpilih India selama 2 periode berencana untuk mencalonkan diri dan menjabat sebagai Perdana Menteri India untuk ketiga kalinya pada proses pemilihan umum India 2024. Selama pemerintahannya, Modi menggunakan narasi populisme berdasarkan agama Hindu sebagai agama mayoritas India. Sebagai pemimpin BJP (bharatiya janata party) yang bergantung pada narasi sayap-kanan radikal, Modi menggunakan nasionalisme agresif untuk menarik perhatian mayoritas pemilihnya. Berangkat dari posisinya sebagai pemimpin populis, Modi menggambarkan kekuasaannya

Received: Mei 22, 2024; Accepted: Juni 22, 2024; Published: Juni 30, 2024

* Muhammad Hafizh Hawari, muh.hafizkdi@gmail.com

menggunakan doktrin Hindutva, yang mendeskripsikan Hindu sebagai identitas etnis asli India. Oleh karena itu, visi politik tersebut berusaha mewujudkan India sebagai “negara Hindu”, yang dalam prosesnya mengalienasi imigran, muslim, dan masyarakat kristen sebagai non-Native (Raychaudhury, 2023).

Karir politik Modi dimulai di Gujarat sebagai eksekutif dari Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), yaitu organisasi yang mendorong narasi Hindutva. Posisi tersebut dipegang oleh Modi hingga tahun 2001, dimana Modi menjadi Gubernur Gujarat selama 3 periode menggunakan narasi Hindutva dan memberikan dirinya visi sebagai hindu hriday samrat, atau kaisar Hindu.(Sinha, 2017). Gerakan tersebut, dalam esensinya menyatukan Dalit, suku etnis Hindu, serta berbagai kasta dan kalangan untuk bersatu di bawah koalisi politik Modi. Narasi populisme yang menjadi ciri khas Modi mulai berkembang di masa jabatannya sebagai Gubernur Gujarat. Pada tahun 2002, sebanyak 59 suporter Hindutva dibakar hidup-hidup oleh aktivis muslim. Kejadian tersebut berujung pada tewasnya lebih dari 3000 muslim pada tahun yang sama sebagai bentuk retaliasi dari kaum Hindutva (Dibyesh, 2005). Menanggapi tuduhan yang diberikan media terhadap penolakan Modi untuk melakukan aksi terhadap kekerasan, Modi menarasikan semua upaya kritis media terhadap kepemimpinannya sebagai upaya serangan terhadap masyarakat Gujarat, dan membawa visi Gujarati Asmita (Gujarat Pride) (Mukhopadhyay, 2013). Pola Modi untuk menarasikan dirinya sebagai perwakilan rakyat etnis mayoritas, dan menempatkan dirinya sebagai “juru bicara” masyarakat yang dia pimpin bermula dari masa kepemimpinannya di Gujarat, yang kemudian dia terapkan ke dalam upaya politiknya untuk memasuki kursi parlemen India. Dikarenakan naratif populis nativisme yang dia lakukan, langkah politik Modi tidak bisa terlepas dari mengalienasi beberapa kelompok komunitas masyarakat tertentu, yang kemudian dinarasikan sebagai “musuh” bagi mayoritas.

KAJIAN TEORITIS

A. Populisme

Populisme, dalam praktiknya merupakan narasi politik yang sulit untuk digeneralisasi. Menurut Urbinati (2019), populisme cenderung mengambil bentuk berbeda tergantung tempat pelaksanaan narasi politiknya. Di negara sekular, populisme membawa visi patriotis dan nasionalisme, sementara di negara religius, populisme membawa narasi keagamaan. Menurut Laclau (2011), keberadaan populisme dalam ilmu kontemporer umumnya dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu studi populisme sebagai

sejarah politis dan media studi komparatif sosial, yang kedua, yaitu populisme sebagai teori politik.

Teori Minimalis Populisme

Teori minimalis populisme merupakan teori yang paling umum digunakan untuk mendefinisikan populisme, yang dirintis oleh Mudde (2004), yang berpendapat bahwa populisme merupakan “sebuah ideologi yang menganggap masyarakat sebagai sebuah badan yang terbagi antara dua kubu berbeda, dan saling mengantagonisasi, dan berdasarkan pada ide bahwa politik harus berdasarkan atas keinginan umum masyarakat”. Keberadaan populisme sebagai ideologi yang membagi masyarakat menjadi dua kubu, dengan mengantagonisasikan salah satu kubu, serta bergantung kepada keinginan umum masyarakat berarti secara inheren populisme bekerja dengan membagi masyarakat menjadi mayoritas, dan sebagian kecil masyarakat yang mengancam keberadaan mayoritas.

Meskipun demikian, penjelasan Mudde tidak memberikan perbedaan yang jelas antara populisme, dan ideologi-ideologi serupa yang meng-antagonisasi dua kubu berbeda, seperti partisan, demokrasi secara umum, ataupun ideologi lain yang bergantung kepada dua kubu yang saling mengoposisi. Peruzzoti (2013), memberikan analisis yang lebih jauh terhadap populisme yaitu “strategi politik, dimana seorang pemimpin karismatik mengejar ataupun melaksanakan kekuatan pemerintahannya melalui dukungan langsung, tanpa institusi, tanpa mediasi oleh kelompok tak terorganisir”. Hal ini berarti, walaupun asal kekuatannya merupakan dari “akar rumput”, populisme tetap didasarkan pada kemampuan elit tertentu untuk memanipulasi massa mayoritas.

B. Populisme India

Plagemann dan Destradi (2019) berpendapat bahwa awal perkembangan populisme di India dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, kepemimpinan Indira Ghandi sebagai perdana menteri India di periode pertama dan kedua pada tahun 1980. Narasi populisme Indira Ghandi dibawa menggunakan pendekatan anti-elitis dan anti-establishment, yang melihat Indira mempertanyakan dan meng-invalidasi pendirian partai politik miliknya sendiri, dan gantinya menarasikan pribadinya sebagai personifikasi dari India, yang dalam pidatonya, menjelaskan bahwa anggota kongres India merupakan konservatif dengan minat yang terbatas kepada pemilik modal, sementara dirinya sendiri merupakan politikus yang memperhatikan rakyat miskin (Guha, 2007).

Menggunakan ideologi yang sama, pemerintahan India di bawah perdana menteri Modi dapat dikatakan sebagai populis, yang berdasarkan pada posisinya sebagai anti-

elitisme dan anti-pluralisme. Modi telah beberapa kali mereferensikan politikus lain ataupun anggota kongres dengan latar belakang pendidikan tinggi sebagai antagonis bagi masyarakat yang tidak paham dengan penderitaan rakyat kecil. Salah satunya berargumen bahwa Jawaharlal Nehru, sebagai perdana menteri pertama India setelah kemerdekaannya dari Inggris merupakan lulusan Cambridge yang telah terputus dari penderitaan rakyat, serta pencapaian Nehru dalam mendirikan negara multikultural selalu dilangkahi dan menolak diberi rekognisi oleh Modi (Madhav, 2017). Selain narasi anti-elitis tersebut, Modi juga menggunakan narasi anti-pluralisme yang dapat diamati sejak tahun 2014. BJP, sebagai partai pendukung Modi, merupakan organisasi Hindutva yang secara terang-terangan menganggap bahwa identitas India merupakan peradaban Hindu, yang berujung dengan antagonisasi etnis minoritas, utamanya warga muslim India.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih oleh penulis agar dapat menjelaskan, dan menganalisa dasar teori berbeda untuk diolah secara empirik. Dalam hal ini, penulis memilih untuk menggunakan teori politik populis sebagai dasar analisis idiosinkratik Narendra Modi, untuk mencari dasar pembuatan keputusan, insentif politik, serta dasar pemilih (voter base) yang dimiliki oleh Narendra Modi. Hasil penelitian tersebut kemudian akan dijadikan bahan analisis terhadap faktor-faktor yang akan mempengaruhi hubungan India dan Pakistan, melalui analisis identitas dasar dan politik kedua negara, serta tindakan aktif yang dilakukan oleh pemerintah India terhadap Pakistan sebagai salah satu insentif peningkatan elektabilitas rezim terpilih Modi. Metode deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini juga digunakan dengan tujuan utama sebagai metode kajian latar belakang politik Narendra Modi, sebagai dasar dari perkembangan karir politiknya, serta sejarah penggunaan narasi populisme yang telah berkembang di India sejak pemerintahan Modi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Populisme dan Pengaruhnya terhadap Hubungan Internasional India

Populisme merupakan gerakan politik yang meskipun dilakukan secara masif, memiliki karakteristik sebagai gerakan yang tidak memiliki dasar institusi, dan sebagai hasilnya, kemampuan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah dalam level nasional, termasuk peraturan dan kebijakan internasional bagi suatu negara.

Kurangnya pengaruh populisme terhadap citra kebijakan internasional India, salah satunya bisa dilihat dari posisi India sebagai salah satu kontributor terbesar terhadap UN peacekeeping forces, dengan urutan ketiga. Pada saat yang sama, Perdana Menteri Modi bahkan mencoba untuk merepresentasikan dirinya sendiri sebagai pembawa damai, dan pada tahun 2015 di konferensi Paris menawarkan diri sebagai perintis riset pengembangan energi terbarukan (Narlikar, 2017). Oleh karena itu, dampak populisme yang dapat diamati terhadap hubungan multilateral India sangat minimal.

Meskipun demikian, keberadaan politik populis di India yang bergantung kepada alienasi dan narasi make India great again sebagai nilai utama dari pemerintahan Modi berujung kepada pembuatan beberapa hukum anti-minoritas. Salah satunya adalah Citizenship amendment bill 2019, yang merupakan upaya India untuk mempercepat proses imigrasi bagi etnik minoritas dari Bangladesh, Pakistan, Nepal dan region Asia Selatan, dengan cara mempermudah transfer kewarganegaraan bagi Hindu, Buddha, Jains dan Kristen ke India. Hukum tersebut merupakan salah satu manifestasi peraturan populis India yang dengan sengaja tidak mengikutsertakan muslim sebagai target programnya (Mushtaq & Ahsan, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun dalam kebijakan multilateral, India terlihat tidak terpengaruh oleh narasi populis yang dibawa oleh Modi, keberadaan narasi tersebut bisa saja dimanifestasikan melalui peraturan domestik yang berdampak secara langsung terhadap keamanan negara di sekitar India.

Selain melalui kebijakan domestik, kegiatan populis India juga berdampak langsung kepada Pakistan melalui hubungan multilateral India yang dilakukan dengan negara sekeliling Pakistan. Kebijakan tetangga ramah milik India yang dilakukan melalui kerjasama ekonomi dengan Afghanistan, serta kerjasama militer dengan Iran, yang membantu India mendapat akses terhadap teluk Arab (Haidar, 2020). Keberadaan India di Afghanistan dan Iran kemudian berpotensi mengimbangi kerjasama yang dilakukan Pakistan dan Cina dengan mengelilingi area sekitar Pakistan dengan aliansi milik India.

Dikarenakan kekuatannya yang berasal dari narasi populis anti-muslim yang termasuk di dalamnya mengantagonisasi Pakistan, sebagai negara pecahan India dengan mayoritas muslim, pemerintahan Modi memiliki insentif yang besar untuk menggunakan krisis yang dialami oleh Pakistan untuk memperkuat citra buruk terhadap Pakistan. Salah satunya, India memberikan pendanaan dan pelatihan militer terhadap pemberontak bersenjata di Balochistan, sebagai salah satu daerah utama target Chinese Pakistan Economic Corridor (CPEC) (Khetran, 2017). India juga membentuk ‘free Balochistan office’ di New Delhi, yang menjadi pusat kerja pemberontak Balochistan (Khan, 2021).

Pengaruh Kebijakan Populis Pemerintahan Modi terhadap Keamanan Pakistan

Naiknya popularitas Hindutva di India telah memberikan indikasi terhadap terjadinya genosida. Beberapa indikator seperti demonisasi terhadap minoritas, serta agravasi yang dilakukan terhadap politikus petahana India sering terjadi, terlebih setelah meningkatnya indikasi dukungan politik terhadap Modi menyingsing pemilihan umum India di 2024 (Sen, 2022).

Indikasi genosida yang dapat terjadi terhadap muslim minoritas India merupakan tanda tanda awal bagi potensi permasalahan pengungsi bagi negara-negara Muslim terdekat dengan India, terutama Pakistan. Sebagai negara berkembang, Pakistan tengah berada dalam periode ketidak-stabilan. Salah satu penyebab utama terhadap ketidak-stabilan tersebut datang dalam bentuk pengungsi asing, yang tiap tahunnya mencapai 1 juta orang pengungsi dari wilayah konflik seperti Afghanistan (Rother, 2016). Sebagai negara muslim terdekat dengan koneksi etnis familiar di Afghanistan, Pakistan telah lama menjadi tujuan pengungsi.

Pengungsi di Pakistan memiliki tendensi untuk melakukan urbanisasi, dan tinggal di wilayah perkotaan Pakistan yang berujung dengan inflasi harga produk, jasa dan perumahan. Inflasi harga yang tidak stabil tersebut kemudian mencegah masyarakat Pakistan untuk melakukan transaksi ekonomi dan menyebabkan roda ekonomi menjadi stagnan dan berujung kepada ketidakstabilan ekonomi (Rother, et al. 2016). Potensi genosida yang akan dilakukan oleh etnis mayoritas India terhadap minoritas muslim, serta inflasi jumlah pengungsi muslim India ke Pakistan sebagai negara terdekat akan menjadi ancaman besar terhadap ekonomi Pakistan yang sendirinya sedang berada di ambang ketidakstabilan akibat pengungsi Afghanistan yang meningkat pasca konflik Taliban.

Ideologi Hindutva yang berdasarkan kepada puritanisme keyakinan Hindu berpendapat bahwa pendirian Pakistan, sebagai negara muslim dari pecahan India merupakan hal yang sangat hina bagi India. Hal ini mendorong India untuk mendirikan 'Indian chronicles' pada tahun 2005 dengan tujuan utama untuk menyebarkan berita buruk, propaganda dan hoax mengenai Pakistan, sebagaimana ditemukan oleh Disinfo lab, suatu NGO asal Eropa pada tahun 2020 (Siddiqui, 2021). Tujuan akhir dari misinformasi tersebut, selain untuk menjatuhkan nama baik Pakistan dalam level internasional, juga berfungsi untuk membawa propaganda India sebagai pilihan yang lebih baik bagi organisasi internasional seperti IMF dan PBB.

Oleh karena itu, dikarenakan ketergantungan petahana India, terutama Mohdi dan BJP terhadap narasi populis yang secara aktif mengantagonisasi muslim minoritas, kestabilan keamanan India - Pakistan akan sulit mencapai tahap dimana hubungan tersebut dapat

memiliki keberlangsungan. Sebagai ekstensi dari kebencian India terhadap Pakistan yang secara aktif dipengaruhi oleh pilihan warga dan politikusnya, kestabilan di kawasan Asia Selatan akan sulit mencapai tahap keberlanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Posisi Modi sebagai perdana menteri India merupakan posisi politik yang berhasil didapatkan melalui dukungan partai (bharatiya janata party) dengan memanfaatkan narasi populis. Narasi populis yang dikenal dengan Hindutva ini merupakan narasi Hindu puritan yang dibawa Modi dengan mengantagonisasikan minoritas muslim dan elit politik. Kedudukan Modi yang karismatik membuat dia bisa mempolarisasi masyarakat Hindu India melawan kubu oposisi yang dinilai sebagai elitis yang tidak memiliki pemahaman dasar terhadap pemerintahan rakyat. Selain itu, posisi Modi sebagai etnis Hindu dengan kasta rendah juga mengizinkannya untuk memiliki relasi yang lebih dalam dengan semua kalangan masyarakat India. Hubungan dengan kasta tinggi yang dia peroleh menggunakan kekuatan politiknya, serta hubungan dengan kasta rendah yang dia peroleh menggunakan kesamaan yang dia miliki dengan kelompok masyarakat tersebut.

Dalam mencapai tujuan politiknya, Modi telah berkali-kali mengantagonisasikan minoritas muslim sebagai musuh bersama sepanjang karirnya berpolitik. Akan tetapi, awal mula dari kebiasaan tersebut dapat dilihat kembali sejak tahun 2002, dimana Modi yang menjabat sebagai gubernur Gujarat memilih diam ketika terjadi pembunuhan yang berujung dengan tewasnya 3000 muslim, serta melawan semua kritik terhadap dirinya sebagai kritik terhadap India. Hal ini berujung melahirkan dua hal:

1. Kemampuan Modi untuk mempolarisasi masyarakat melalui identitas Hindu yang mereka miliki sebagai seseorang yang berhak memakai identitas India, dan pada saat yang sama mengalienasi minoritas, seperti Muslim dan Kristen.
2. Citra karismatik Modi yang dia pakai untuk menyerang petahana dan membantu dirinya memenangkan 2 periode pemilihan umum sebagai Perdana Menteri India.

Sebagai akibat dari narasi polarisasi yang dipakai oleh Modi dan partainya untuk dapat melaksanakan kekuasaan melalui putusan mayoritas, Modi mengesahkan beberapa peraturan domestik diskriminatif terhadap lawan politiknya. Salah satunya adalah kemudahan bagi agama minoritas selain Islam untuk mendapatkan kewarganegaraan India. Selain itu, tendensi Modi untuk menjadi permisif juga mengizinkan tindakan yang mendemonisasi dan berpotensi berujung kepada genosida bagi muslim.

Keputusan pemerintah India yang dipengaruhi oleh citra populis Modi berujung kepada potensi krisis bagi Pakistan. Potensi genosida yang dapat terjadi kepada minoritas muslim India merupakan potensi krisis pengungsi bagi Pakistan, sebagai negara muslim dengan ikatan etnis dan letak geografis terdekat dengan etnis muslim India. Selain itu, Hindutva yang merupakan ideologi Puritan Hindu menganggap bahwa keberadaan Pakistan sebagai negara muslim yang pecah dari Hindu - India merupakan hinaan bagi pemerintahan India, dan mendorong pemerintah India untuk melakukan pendanaan bagi pemberontak bersenjata di Pakistan untuk mencegah CPEC, serta operasi propaganda cyber dengan tujuan meng-delegitimasi Pakistan.

Dikarenakan pemerintahan Perdana Menteri Modi dan jajaran kabinetnya yang bergantung kepada narasi populisme yang bahkan mendukung personifikasi Modi sebagai negara India secara inherent tidak akan bisa melanjutkan kepemimpinannya tanpa keberadaan polarisasi yang sangat kuat terhadap etnis muslim India, kestabilan politik serta keamanan regional di Asia Selatan yang harus didahului dengan meredanya tensi antara Pakistan dan India belum dapat tercapai.

DAFTAR REFERENSI

- Anand, D. (2005). The violence of security: Hindu nationalism and the politics of representing 'the Muslim' as a danger. *The Round Table*, 94(379), 203-215.
- GUHA, RAMACHANDRA. (2007). *India after Gandhi*. London: Pan Macmillan
- Haidar, S. (2020, July 19). The Hindu explains: Why is India out of the Chabahal Rail Project? *The Hindu*. <https://www.thehindu.com/news/international/the-hindu-explains-why-is-india-out-of-the-chabahal-rail-project/article32126361.ece/amp/>
- Khan, M. A. (2021). Indian Interference in Balochistan. *The Nation*. <https://www.nation.com.pk/08-Feb-2021/indian-interference-in-balochistan>
- Khetran, M. S. (2017). Indian interference in Balochistan. *Strategic Studies*, 37(3), 112-125. DOI: <https://doi.org/10.53532/ss.037.03.00212>
- Laclau E. (2011). *Politics and Ideology in Marxist Theory: Capitalism, Fascism, Populism*. London
- MADHAV, RAM. (2017). "Coming Full Circle at 70." *Indian Express* August 15, 2017. <http://indianexpress.com/article/opinion/columns/independence-day-coming-full-circle-at70-atal-bihari-vajpayee-hamid-ansari-muslims-india-insecure-modi-nehru-4796919/>
- Mudde C. (2004). The populist zeitgeist. *Gov. Opposition* 39(3):541–63

- Mukhopadhyay, N. (2013). *Narendra Modi: The man, the times*. New Delhi, India: Tranquebar Press.
- Mushtaq, S., Mazari, F., & Ahsan, S. (2024). Populism in India Under Modi Regime and its Implications for Pakistan. *NUST Journal of International Peace & Stability*.
- Peruzzotti E. (2013). Populism in democratic times: populism, representative democracy and the debate on democratic deepening. In *Latin American Populism in the Twenty-First Century*, ed. C De la Torre, CJ Arnson, pp. 61–84. Baltimore, MD: Johns Hopkins Univ. Press
- Plagemann, J., & Destradi, S. (2019). Populism and foreign policy: The case of India. *Foreign Policy Analysis*, 15(2), 283-301.
- Raychaudhury, P. (2023, April 19). □ Narendra Modi: India’s “vulnerable” strongman populist leader. *The Loop*. <https://theloop.ecpr.eu/narendra-modi-indias-vulnerable-strongman-populist-leader/>
- Rother, M. B., Pierre, M. G., Lombardo, D., Herrala, R., Toffano, M. P., Roos, M. E., ... & Manasseh, M. K. (2016). The economic impact of conflicts and the refugee crisis in the Middle East and North Africa. *International Monetary Fund*.
- SIDDIQUI, T. (2021). INDIAN CHRONICLES: AN ANALYSIS OF THE CAUSES OF INDIAN ENMITY AND. *INSTITUTE OF REGIONAL STUDIES ISLAMABAD*, 39(3), 3-26.
- Sinha, S. (2017). Mediatized populisms| fragile hegemony: Social media and competitive electoral populism in India. *International Journal of Communication*, 11, 23.
- Urbinati, N. (2019). Political theory of populism. *Annual review of political science*, 22, 111-127.